

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ATAS  
OBYEK PEMBIAYAAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI:  
ANALISIS PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA  
PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA  
INTISARI**

Oleh:

**Rendy Kurniawan, S.H.\* dan Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.\*\***

Penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan atas Obyek Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi: Analisis Perjanjian Sewa Guna Usaha PT Indomobil Finance Indonesia” ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dianalisis dengan cara kualitatif.

Tujuan penelitian ini yaitu (1) mengetahui status kepemilikan obyek pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi apabila obyek pembiayaan tersebut diatasmamakan kepada penerima fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi; (2) mengetahui status penjaminan secara fidusia atas obyek pembiayaan yang diatasmamakan kepada penerima fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi; dan (3) mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi atas pembiayaan yang mana obyek pembiayaan diatasmamakan penerima fasilitas sewa guna usaha dengan hak opsi.

Hasil Penelitian: Pertama, berdasarkan konsep hukum kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, hak milik barang modal tetap berada pada *lessor* hingga jangka waktu perjanjian sewa guna usaha berakhir yang kemudian akan beralih kepada *lessee* jika *lessee* menggunakan hak opsinya untuk membeli barang modal tersebut. Kedua, konsep jaminan fidusia atas kendaraan bermotor lebih tepat untuk diterapkan dalam kegiatan pembiayaan konsumen sebagaimana dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Dimana berdasarkan konsep mengenai pembiayaan konsumen, telah terjadi perpindahan hak milik dari perusahaan pembiayaan kepada penerima fasilitas pembiayaan. Ketiga, dengan diterbitkannya POJK No. 29/POJK.05/2014 menyebabkan ketidaksesuaian antara prinsip umum kegiatan sewa guna usaha pada umumnya dan pelaksanaannya di lapangan terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia atas kendaraan bermotor sebagai obyek perjanjian sewa guna dengan hak opsi.

**Kata Kunci:** sewa guna usaha, *leasing*, kendaraan bermotor, BPKB, fidusia.

---

\* Postgraduate Student Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

\*\* Postgraduate Lecturer Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

## LEGAL PROTECTION OF FINANCING COMPANY OVER LEASE OBJECTS WITH OPTION RIGHTS: THE ANALYSIS OF PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA'S LEASE AGREEMENT

### ABSTRACT

By:

**Rendy Kurniawan, S.H.\* dan Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.\*\***

This research entitled “Legal Protection of Financing Company over Lease Objects with Option Rights: The Analysis of PT Indomobil Finance Indonesia’s Lease Agreement” falls into the category of normative legal research. Datas being used in this research is secondary data obtained from literature research and analysed qualitatively.

The Purposes of this research are: (1) to find out legal status of the ownership over lease objects with option rights if such object is listed under the name of the lesee; (2) to find out legal status of fiduciary registration over lease objects listed under the name of the lessee with option rights; and (3) to find out the legal protection given to the financing company which provides lease facilities with option rights over lease objects listed under the name of lesee with option rights.

Research findings: First, based on the legal concept of lease with option rights, the right of ownership over capital goods is still in the hand of lessor until the end of period of lease agreement in which such rights will be shifted to the lessee if lesse decided to exercise his/her option rights to buy such capital goods. Second, fiduciary concept over motor vehicle is more appropriate to be implemented in consumer finance scheme as it is stated under Ministry of Finance Regulation Number 130/PMK.010/2012 in regards to Fiduciary Registration for Financing Companies which Provide Consumer Finance Facility over Motor Vehicle with Fiduciary Imposition. Third, the issuance of OJK Regulation Number 29/POJK.05/2014 caused incompatibilities between the general principles of lease activities with its application in the field with regards to fiduciary registration over motor vehicle as the objects of lease agreement with option rights.

**Key Words:** *financial institutions, leasing, motor vehicle, BPKB, fiduciary*

---

\* Postgraduate Student Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

\*\* Postgraduate Lecturer Faculty of Law Universitas Gadjah Mada